



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA TAHUN 2021 (Refocusing IV)

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.60/SET.10/PROEV/REN.0/1/2021

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. bahwa berdasarkan Amar Kedua Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I dan Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021;

Mengingat ...



KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form Discrimination Against Women/CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

- 3 -

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 209)

17. Peraturan ...

- 4 -

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
 2. Keputusan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat

Direktorat ...



- 5 -

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/PHLHK/SET.10/REN.2/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;

MENETAPKAN:

Memutuskan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan anggaran lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



SUGENG PRIYANTO

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR		iv vi
Bab I - Pendahuluan	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi dan Data Terpilah Sumber Daya Manusia	3
	D. Pengarusutamaan Gender	5
	E. Data Terpilah Sarana Prasarana	6
Bab II - Capaian Sasaran Program dan Prognosis	A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2015 s.d 2019	7
	B. Capaian Serapan Anggaran 2015 s.d 2019	7
	C. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan 2020	8
	D. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2020	9
	E. Prognosis Indikator Kinerja Unit Kegiatan Tahun 2020	10
Bab III – Rencana Kerja 2021	A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional	14
	B. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama	18
Bab IV – Penutup		29
LAMPIRAN - LAMPIRAN		30

LAMPIRAN-LAMPIRAN



I. - INDIKATOR KINERJA UTAMA GAKKUM KLHK TA 2021	31
II. - INDIKATOR KINERJA PROGRAM GAKKUM KLHK TA 2021	32
III. - INDIKATOR KINERJA KEGIATAN GAKKUM KLHK TA 2021	33
IV. - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TA 2021	34
V. - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK TA 2021	35



KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/PHLHK/SET.10/SET.1/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun RKA K/L Tahun 2021, pelaksanaan dan pengendalian Program Dukungan Manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir Kata, semoga Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh segenap aparat lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto. M.Si

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan tahun 2020 untuk keberhasilan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode tersebut. Sejak awal hingga triwulan kedua tahun 2020, hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di semua negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan kedua di dalam Pelaksanaan Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK.

Dokumen RENJA ini turut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2021 dan RENJA Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, dimana mencakup sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK terutama harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.





BAB I - PENDAHULUAN

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 495 dan Pasal 496



TUGAS

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK



FUNGSI

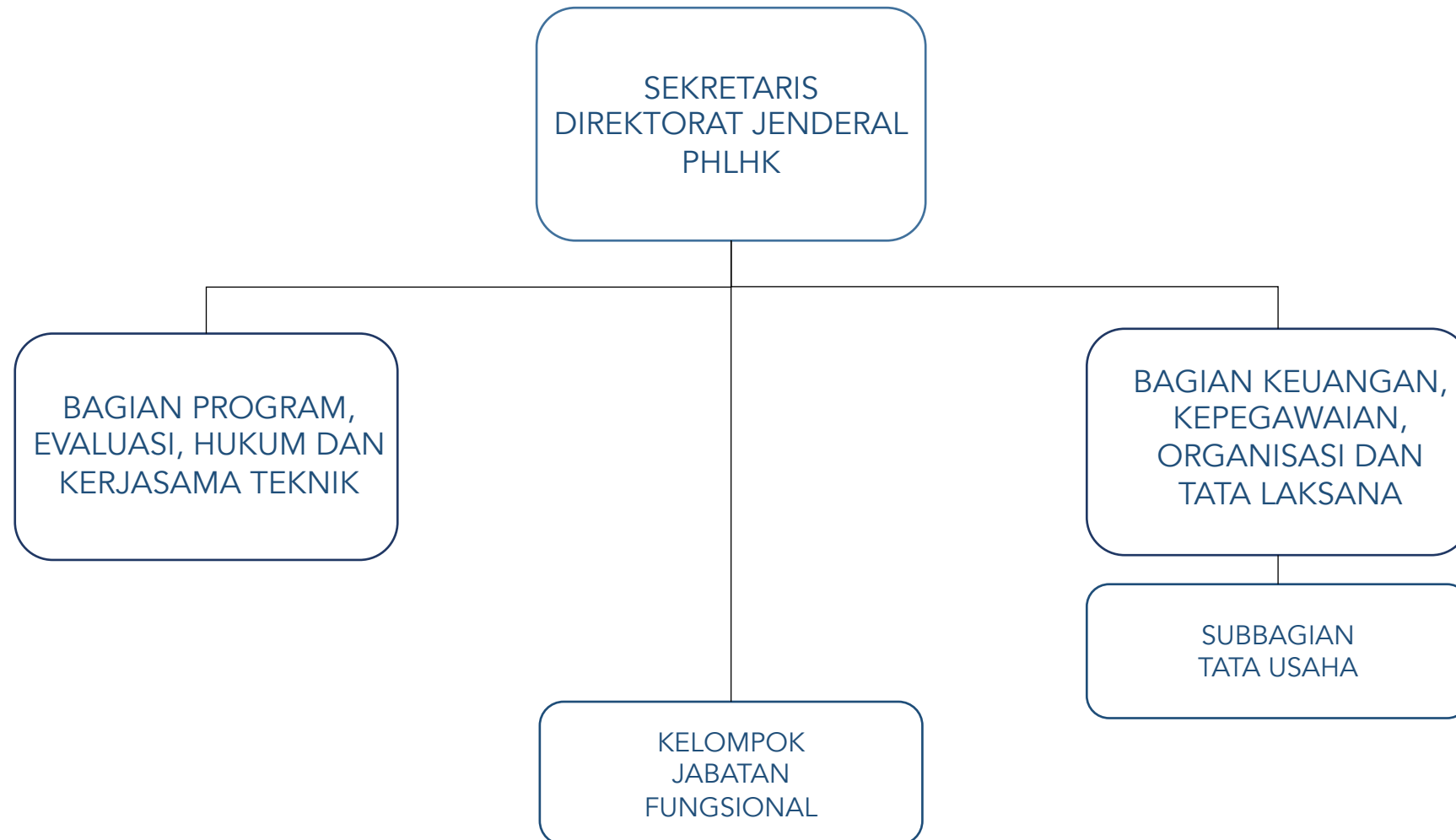
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.



BAB I - PENDAHULUAN

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

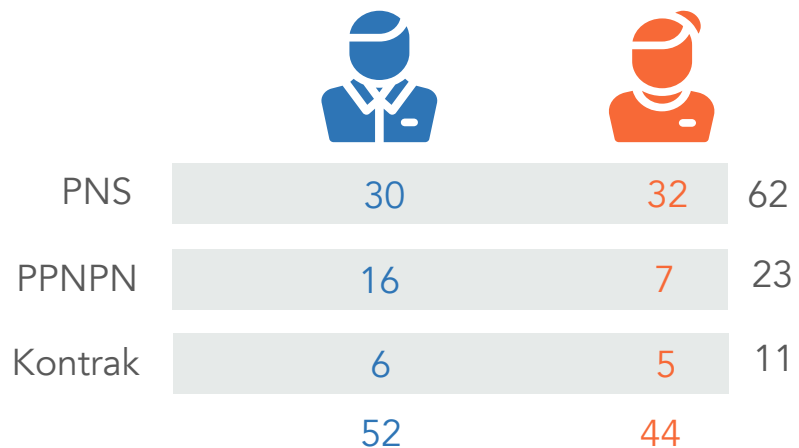
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 497.



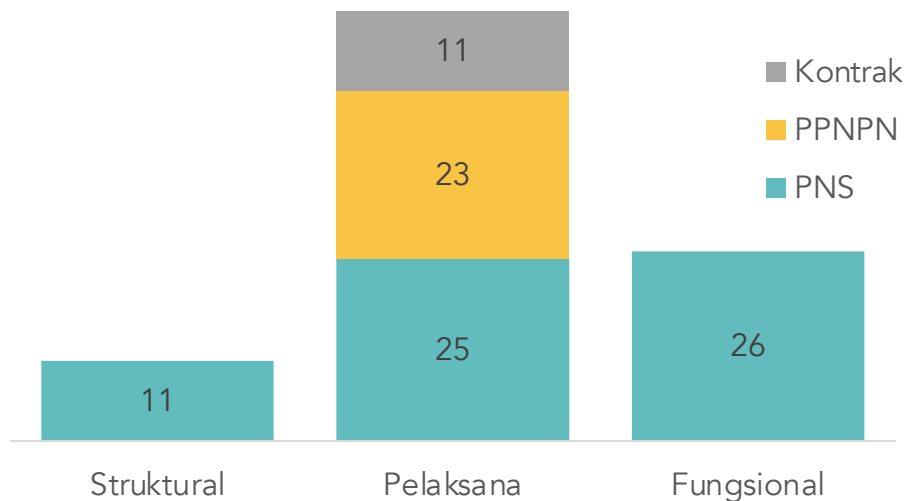


BAB I - PENDAHULUAN

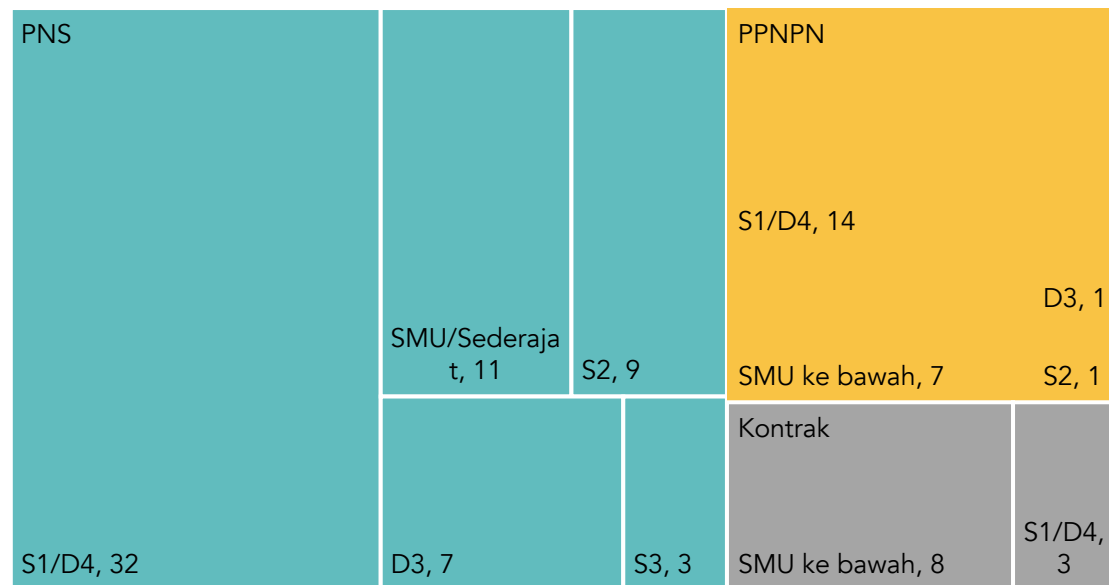
Sumber Daya Manusia



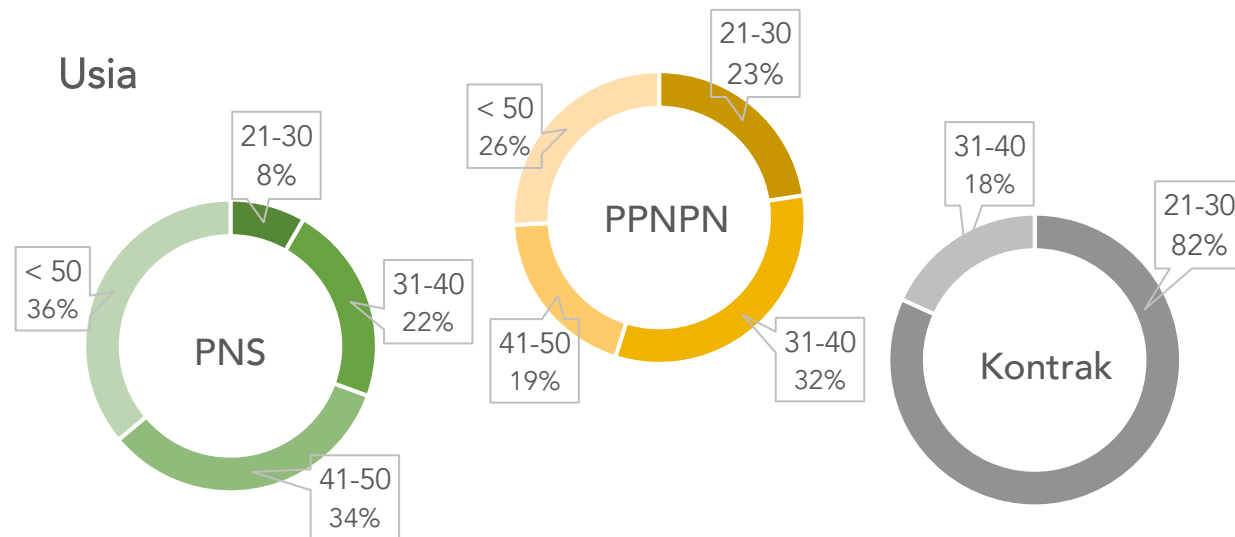
Jabatan



Tingkat Pendidikan



Usia





BAB I - PENDAHULUAN

D. Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM KLHK Tahun 2021







Komitmen Ditjen Gakkum LHK di Tahun 2021 terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2021	Satuan
Peningkatan Kapasitas Staf Ditjen GAKKUM KLHK Untuk Mengimplementasikan Practical Gender Concerns	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Konsep Gender Dan Penghapusan Stereotip Gender Di Kalangan Staf Ditjen GAKKUM KLHK	Jumlah Staff Ditjen GAKKUM KLHK memiliki pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip Gender	200	Orang
		Tersedianya kurikulum dan modul responsive gender	1	Dokumen
		Jumlah Staff Penegak Hukum Ditjen GAKKUM KLHK dilatih untuk ditugaskan menjadi Fasilitator Gender dan Sub POKJA PUG	40	Orang
	Memastikan Pemahaman Bersama Mengenai Kesetaraan Gender Melalui Perubahan Kelembagaan Serta Implikasinya Dan Komitmen Terhadap Anti Pelecehan Seksual Dan Eksploitasi Seksual	Persentase Staff GAKKUM KLHK memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender dan stereotip Gender.	35	Persen
		Tersedianya Materi Komunikasi/Kampanye untuk promosi kesetaraan gender, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, agar meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender di lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK	1	Survei
Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender	Fasilitas yang Responsif Gender di lingkungan Kerja Ditjen GAKKUM KLHK	Tersedianya Standar dan Prosedur Pengadaan Fasilitas dan Peralatan yang Responsif Gender terhadap kebutuhan staff perempuan dan laki laki untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam Ditjen GAKKUM KLHK. Adanya peralatan kerja yang Responsif Gender untuk Staff Ditjen GAKKUM KLHK	1	Dokumen
Monitoring dan Evaluasi yang Sensitif Gender	Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi Responsif Gender	Tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsive gender untuk menilai dampak atau manfaat program yang dilaksanakan	1	Dokumen



BAB I - PENDAHULUAN

E. Data Terpilah Sarana Prasarana

Jenis SARPRAS	SATKER						TOTAL
	PUSAT	SUMATERA	JABALNUSRA	KALIMANTAN	SULAWESI	MALUKU PAPUA	
 mobil patrol/intelijen	4	26	22	34	25	22	133
 mobil pengawas	11	0	0	0	0	0	11
 mobil tahanan	1	1	1	1	1	1	6
 motor patroli	6	40	17	79	80	48	270
 drone	29	9	8	14	9	12	81
 gps	36	28	21	40	25	14	164
 laptop	321	92	69	109	16	50	717
 senjata api	51	85	29	65	39	57	326



BAB II - CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN PROGNOSIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.78 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan perubahan Indikator Kinerja Program lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK 2015 s.d 2019, antara lain :

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 s.d 2019;

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	70	72	75	78	Poin
			CAPAIAN					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	Poin
			75.98	70,43	72,58	76,64	78.84	Poin

B. Capaian Serapan Anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 s.d 2019;

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN (000)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	85.358.870	74.714 .315.	122.889.517	142.106.181	172.773.299
			REALISASI ANGGARAN (000)				
			2015	2016	2017	2018	2019
			67.589.154	74.069 .555	119.766.673	139.589.890	171.303.763

C. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020;

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET RKP 2020	TARGET REVISI COVID 19	PROGNOSIS 2020
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK	Terwujudnya Reformasi Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	75 Poin	72 Poin	72 Poin
			Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	3 Level	3 Level	3 Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

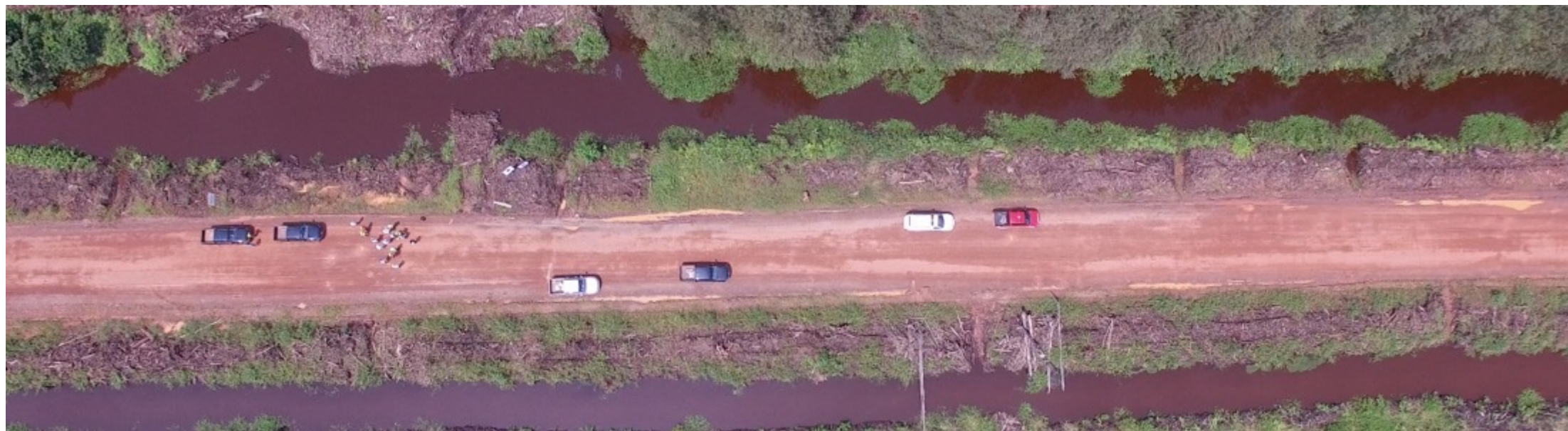




BAB II - CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN PROGNOSIS

D - Prognosis Realisasi Anggaran Unit Kegiatan Tahun 2020

Kegiatan	Output	Anggaran (Rp .000)		
		RENSTRA 2020	RENJA 2020	Prognosis 2020
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	19.452.009	17.560.949	17.456.723
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.250.000	2.812.700	2.599.870.
	Layanan Perkantoran	144.757.762	143.929.714	142.621.859
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	6.560.000	0	
		173.019.771	164.303.363	162.678.453
		Prognosis Realisasi		99 %





BAB II - CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN PROGNOSIS

E - Prognosis Indikator Kinerja Unit Kegiatan Tahun 2020

Unit Kegiatan	Bagian Program dan Evaluasi
---------------	-----------------------------

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	TARGET 2020	PROGNOSIS 2020	SATUAN
Tersedianya dokumen rencana program Ditjen GAKKUM LHK	Jumlah dokumen RENJA Ditjen PHLHK	1	1	Dokumen
	Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja	10	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Rencana Aksi	10	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Renstra	1	1	Dokumen
	Jumlah dokumen Renstra Unit Kerja	10	10	Dokumen
Tersedianya dokumen anggaran Ditjen GAKKUM LHK	Jumlah dokumen RKAKL	6	6	Dokumen
	Jumlah dokumen revisi RKAKL	12	12	Dokumen
	Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	1	1	Dokumen
	Peraturan Standar Biaya Teknis	1	1	Dokumen
Terselenggaranya dukungan program dan anggaran PHLHK	Jumlah bahan kerja pimpinan PHLHK	12	12	Laporan
	Raker Penegakan Hukum	1	1	Laporan
Tersedianya dokumen pelaporan lingkup Ditjen GAKKUM LHK	Jumlah dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen PHLHK	11	11	Dokumen
	Jumlah dokumen Desain SPIP lingkup Ditjen PHLHK	10	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Tahunan lingkup Ditjen GAKKUM LHK	11	11	Dokumen



BAB II - CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN PROGNOSIS

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Prognosis 2020	SATUAN
Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye	Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	100	100	Berita
	Jumlah media kampanye/pameran PHLHK	10	10	Pameran
Tercapainya data dan informasi penegakan hukum	Jumlah satuan kerja yang tekoneksi dengan sistem data dan informasi terpusat	3	3	Satuan Kerja
	Jumlah publikasi melalui media social Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, Youtube, dan Website)	500	500	Posting

Unit Kegiatan	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
---------------	--

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2020	Prognosis 2020	SATUAN
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Polisi Kehutanan dalam mendukung PHLHK	679	679	Orang
	Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan pengawasan lingkungan hidup	158	158	Orang
	Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan penyidikan	206	206	Orang
	Jumlah sumber daya manusia PHLHK yang meningkat kompetensinya	1.326	1.326	Orang
Tersusunnya stuktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien	Terlaksananya penyempurnaan struktur organisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	Usulan
	Terlaksananya penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup Direktorat Jenderal PHLHK	1	1	Dokumen



BAB II - CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN PROGNOSIS

Unit Kegiatan	Keuangan dan Umum
---------------	-------------------

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2020	Prognosis 2020	SATUAN
Meningkatnya efektivitas administrasi keuangan	Opini WTP untuk laporan keuangan	1	1	Dokumen
	Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	10	10	Orang
Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan	Identifikasi register asset secara elektronik	1	1	Dokumen
	Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satuan kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	1.556	1.556	Unit
	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1	1	Dokumen SK
	Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi SIK	1	1	Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen dinas	1	1	Laporan
	Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	1	Laporan





BAB II - CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN PROGNOSIS

Unit Kegiatan	Hukum dan Kerjasama Teknik
---------------	----------------------------

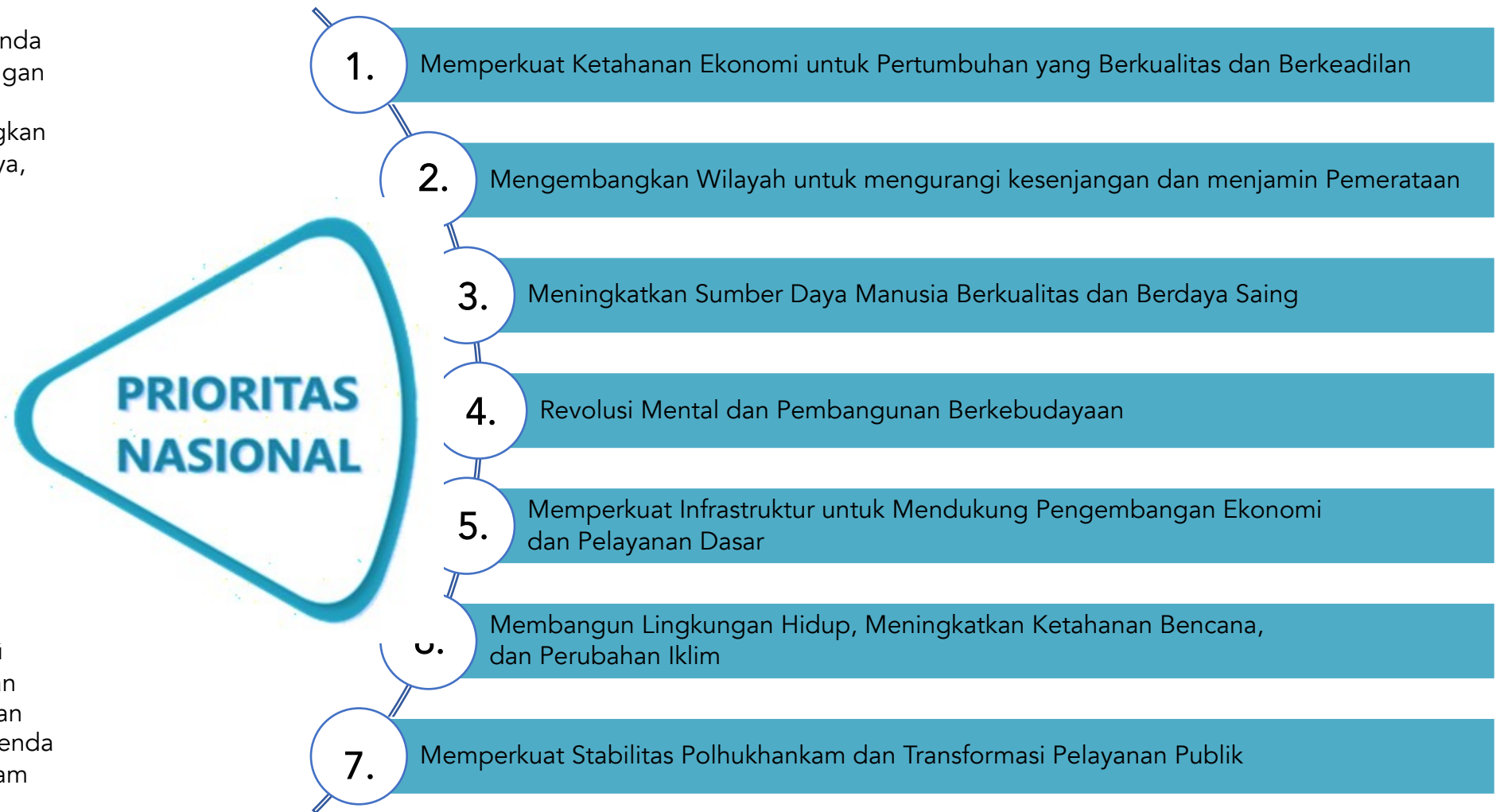
Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2020	Prognosis 2020	SATUAN
Tersedianya aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan	3	3	Dokumen
	Jumlah NSPK	3	3	Orang
Tersedianya Rumusan Kajian Hukum Ditjen PHLHK	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	5	5	Dokumen
Tersedianya Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum	5	5	Dokumen Putusan
Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan PHLHK	Jumlah Kerjasama Teknik Dalam Negeri terkelola	12	12	Dokumen/ draft kerjasama
	Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	5	5	Dokumen/ draft kerjasama





A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional

RPJMN 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dari RKP Tahun 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024



Rencana Kerja Pemerintah 2021 (RKP 2021) disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Bagi Pemerintah Pusat, RKP 2021 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2021. Dokumen RKP 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif

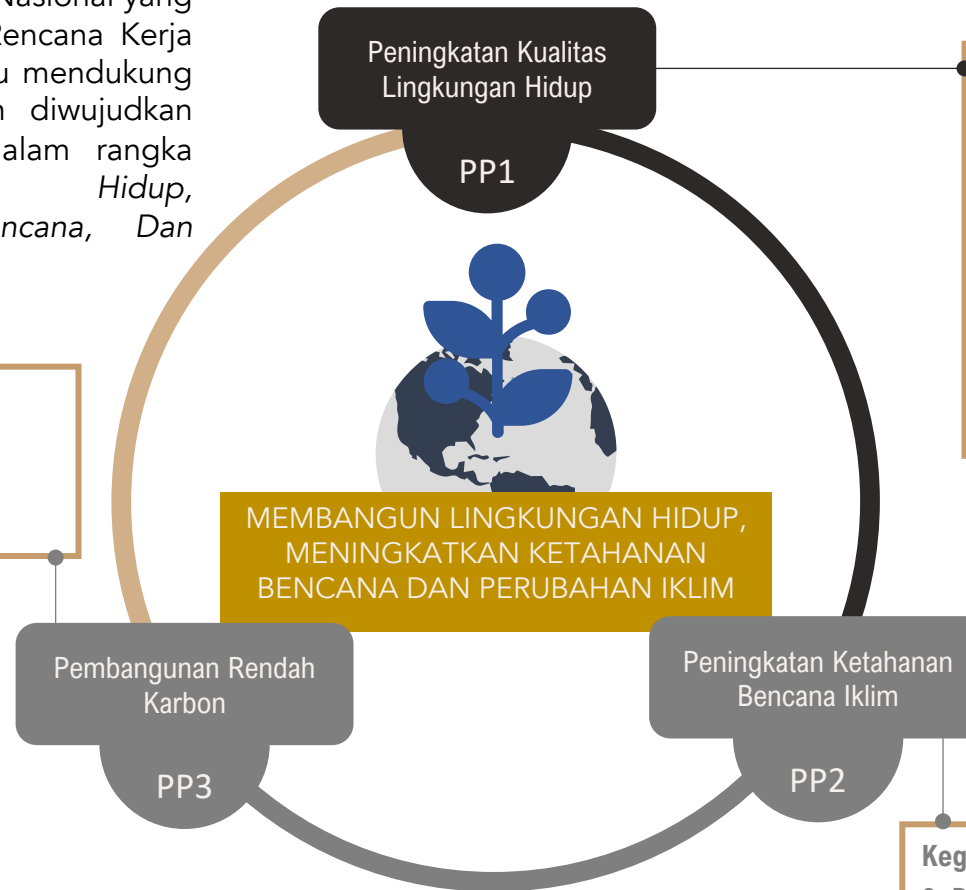


Rencana Kerja Ditjen GAKKUM KLHK Tahun 2021 mengikuti Arahan Prioritas Nasional yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2021, yaitu mendukung pencapaian sasaran yang akan diwujudkan Prioritas Nasional 6 (Enam) dalam rangka *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim.*

Kegiatan Prioritas:

2. Pemulihan lahan berkelanjutan
3. Penanganan limbah
5. Rendah karbon pesisir dan laut

Didalam Dokumen Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 yang terkait dengan KLHK adalah (KP 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup



Kegiatan Prioritas:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kegiatan Prioritas:

2. Peningkatan ketahanan iklim



BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2021 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan pandemi COVID-19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 435 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
029.WA	Dukungan Manajemen	3.487.871.584
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.288.257.788
029.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	36.534.505
029.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	108.575.810
029.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	834.926.008
029.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	200.949.088
TOTAL		7.957.114.783

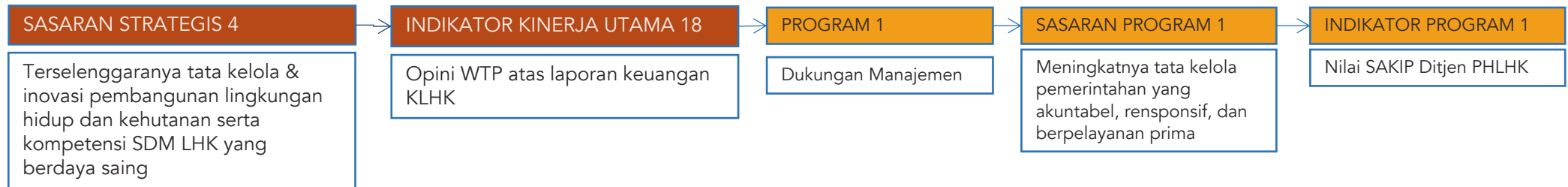




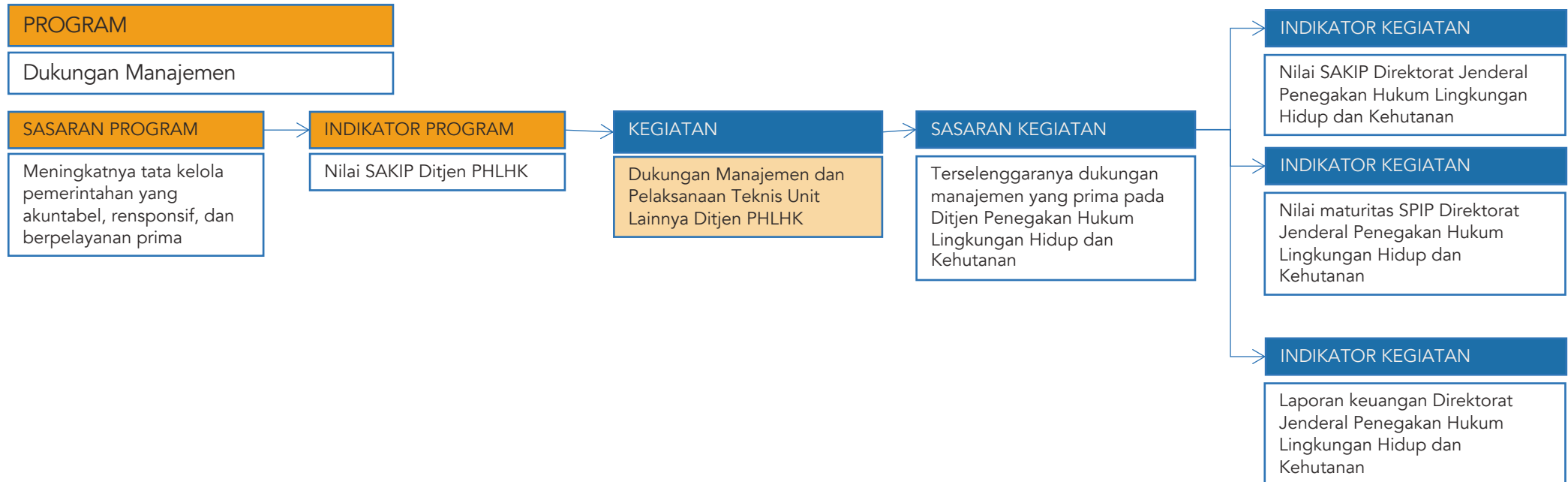
BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

B. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024, berikut Konsep Logic Model untuk Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :



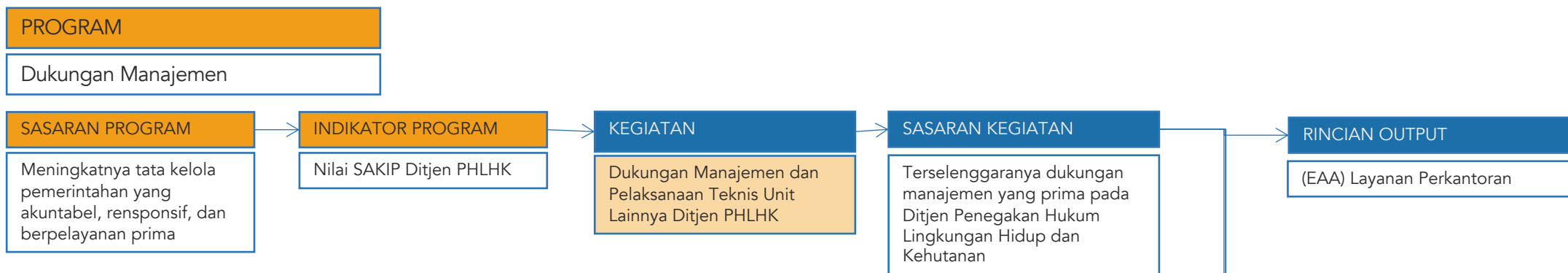
1. Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan





BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

2. Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan Klasifikasi Rincian Output



Kode KRO NON PN	Kode KRO PN	Klasifikasi Rincian Output	Satuan	Definisi Klasifikasi Rincian Output
EAA	-	Layanan Perkantoran	Layanan	Layanan Perkantoran mencakup belanja pegawai dan belanja barang meliputi gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor.
EAC	TAC	Layanan Umum	Layanan	Layanan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi personalia, kerumahtanggaan, keuangan, pencatatan, distribusi barang serta logistik di sebuah organisasi
EAD	TAD	Layanan Sarana Internal	Layanan	layanan yang dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas sarana (umumnya merujuk pada benda bergerak) dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai internal organisasi
EAE	TAE	Layanan Prasarana Internal	Layanan	Layanan Prasarana Internal adalah layanan yang dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas prasarana (umumnya merujuk pada benda tidak bergerak atau bangunan) dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai internal organisasi



BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

3. Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2021

Program	Dukungan Manajemen			
Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target	Anggaran Semula ('000)	Anggaran Refocusing IV ('000)
(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	12.419.465	10.256.797
(EAD) Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	3.842.544	2.968.000
(EAA) Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran (Operasional Dan Gaji)	1 Layanan	144.757.762	155.201.127
(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5 Layanan	5.000.000	4.863.382

4. Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK		Anggaran Semula ('000)	Rp. 54.433.065
		Anggaran Refocusing IV ('000)	Rp 51.932.329
		Target 2021	
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	74 Poin
		Nilai Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan
	Rincian Output	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan
		Layanan Perkantoran	1 layanan



BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

5. Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2021

Didalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender (ARG) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki SDM secara aktif; dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan Tagging Pagu Anggaran di Aplikasi KRISNA Tahun 2021, berikut ini Rekapitulasi, indentifikasi Anggaran Responsif Gender Ditjen GAKKUM KLHK.

Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Target Refocusing IV 2021	Tagging ARG ('000)
Peningkatan Kapasitas PPLH	DCE- Pelatihan Bidang LHK	95 PPLH	4.199.601
Layanan Sarana Internal	(EAD) Layanan Sarana Internal	1 Layanan	2.968.000
Tagging 003 - Anggaran Responsif Gender			7.167.601
Anggaran Kelembagaan Sub Kelompok Kerja Ditjen GAKKUM KLHK			93.080
Total Anggaran Responsif Gender Ditjen GAKKUM KLHK TA 2021			7.260.681

6. Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) Tahun 2021

Adapun komponen aksi mitigasi yang harus dieksekusi adalah mencakup:

1. Kegiatan patroli, sosialisasi dan operasi lapang untuk penjagaan hutan dari ancaman dan gangguan;
2. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi (KPHK) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
3. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
4. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dari:
5. Kebakaran Hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan

Rincian Output	Target Refocusing IV 2021	Anggaran ('000)
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	63 Operasi	19.486.497
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	42 Operasi	28.362.602
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	342 Orang	2.354.837
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	505 Lembaga	18.764.238
Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	127 Perkara	25.179.220
Kasus Tindak Pidana LHK P21 Badan Usaha	3 Perkara	3.583.228
Peningkatan Kapasitas PPNS LHK	200 Orang	10.549.331
Penanganan Sengketa LH	22 Perkara	8.658.384
Tagging 003 - Mitigasi Perubahan Iklim		116.938.337



BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

7. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2021, Per Output Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan	Output	Anggaran (Rp .000)		
		RENSTRA 2021	RENJA 2021	REFOCUSING IV
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	21.452.009	12.419.465	10.256.797
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.250.000	3.842.544	2.968.000
	Layanan Perkantoran	147.457.762	144.757.762	155.201.127
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	7.060.000	5.000.000	4.863.382
		178.219.771	166.019.771	173.289.306





BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

8) Rencana Kerja Unit Kegiatan Tahun 2021

Unit Kegiatan	Bagian Program dan Evaluasi
---------------	-----------------------------

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	TARGET 2021	SATUAN
Tersedianya dokumen rencana program Ditjen GAKKUM LHK	Jumlah dokumen RENJA Ditjen PHLHK	1	Dokumen
	Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Rencana Aksi	10	Dokumen
Tersedianya dokumen anggaran Ditjen GAKKUM LHK	Jumlah dokumen RKAKL	6	Dokumen
	Jumlah dokumen revisi RKAKL	12	Dokumen
	Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	1	Dokumen
	Peraturan Standar Biaya Teknis	1	Dokumen
Terselenggaranya dukungan program dan anggaran PHLHK	Jumlah bahan kerja pimpinan PHLHK	12	Laporan
	Raker Penegakan Hukum	2	Laporan
Tersedianya dokumen pelaporan lingkup Ditjen GAKKUM LHK	Jumlah dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen PHLHK	11	Dokumen
	Jumlah dokumen Desain SPIP lingkup Ditjen PHLHK	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Tahunan lingkup Ditjen GAKKUM LHK	11	Dokumen



BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	SATUAN
Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye	Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	100	Berita
	Jumlah media kampanye/pameran PHLHK	10	Pameran
Tercapainya data dan informasi penegakan hukum	Jumlah satuan kerja yang terkoneksi dengan sistem data dan informasi terpusat	4	Satuan Kerja
	Jumlah publikasi melalui media social Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, Youtube, dan Website)	500	Posting

Unit Kegiatan	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
---------------	--

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2021	SATUAN
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Polisi Kehutanan dalam mendukung PHLHK	732	Orang
	Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan pengawasan lingkungan hidup	173	Orang
	Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan penyidikan	236	Orang
	Jumlah sumber daya manusia Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meningkat kompetensinya	1.409	Orang
Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien	Terlaksananya penyempurnaan struktur organisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Usulan
	Terlaksananya penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup Direktorat Jenderal PHLHK	1	Dokumen



BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

Unit Kegiatan	Keuangan dan Umum
---------------	-------------------

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2020	SATUAN
Meningkatnya efektivitas administrasi keuangan	Opini WTP untuk laporan keuangan	1	Dokumen
	Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	10	Orang
Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan	Identifikasi register asset secara elektronik	1	Dokumen
	Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satuan kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	1.707	Unit
	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1	Dokumen SK
	Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi SIK	1	Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen dinas	1	Laporan
	Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Laporan

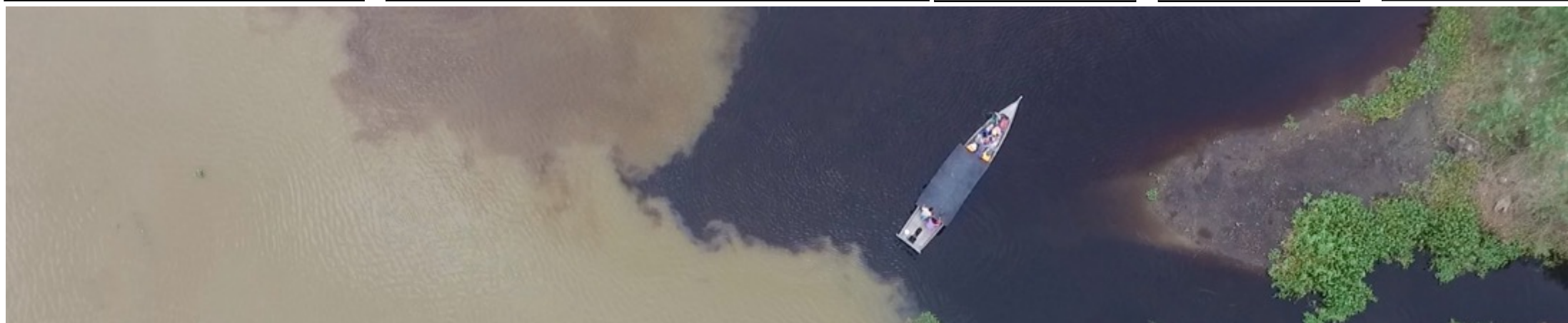




BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

Unit Kegiatan	Hukum dan Kerjasama Teknik
---------------	----------------------------

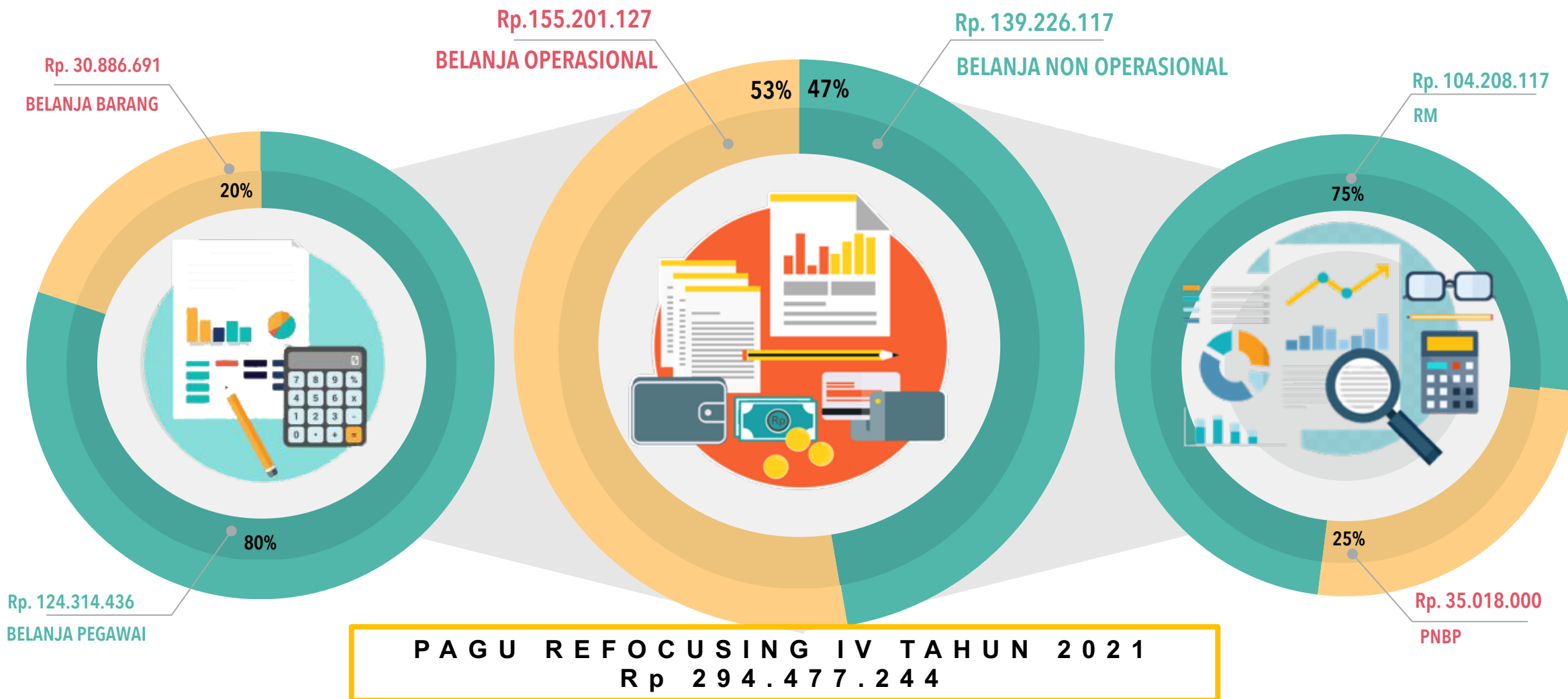
Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	SATUAN	SATUAN	SATUAN
Tersedianya aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan	3	3	Dokumen
	Jumlah NSPK	2	2	Orang
Tersedianya Rumusan Kajian Hukum Ditjen PHLHK	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	5	5	Dokumen
Tersedianya Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum	5	5	Dokumen Putusan
Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan PHLHK	Jumlah Kerjasama Teknik Dalam Negeri terkelola	12	12	Dokumen/ draft kerjasama
	Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	5	5	Dokumen/ draft kerjasama





BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

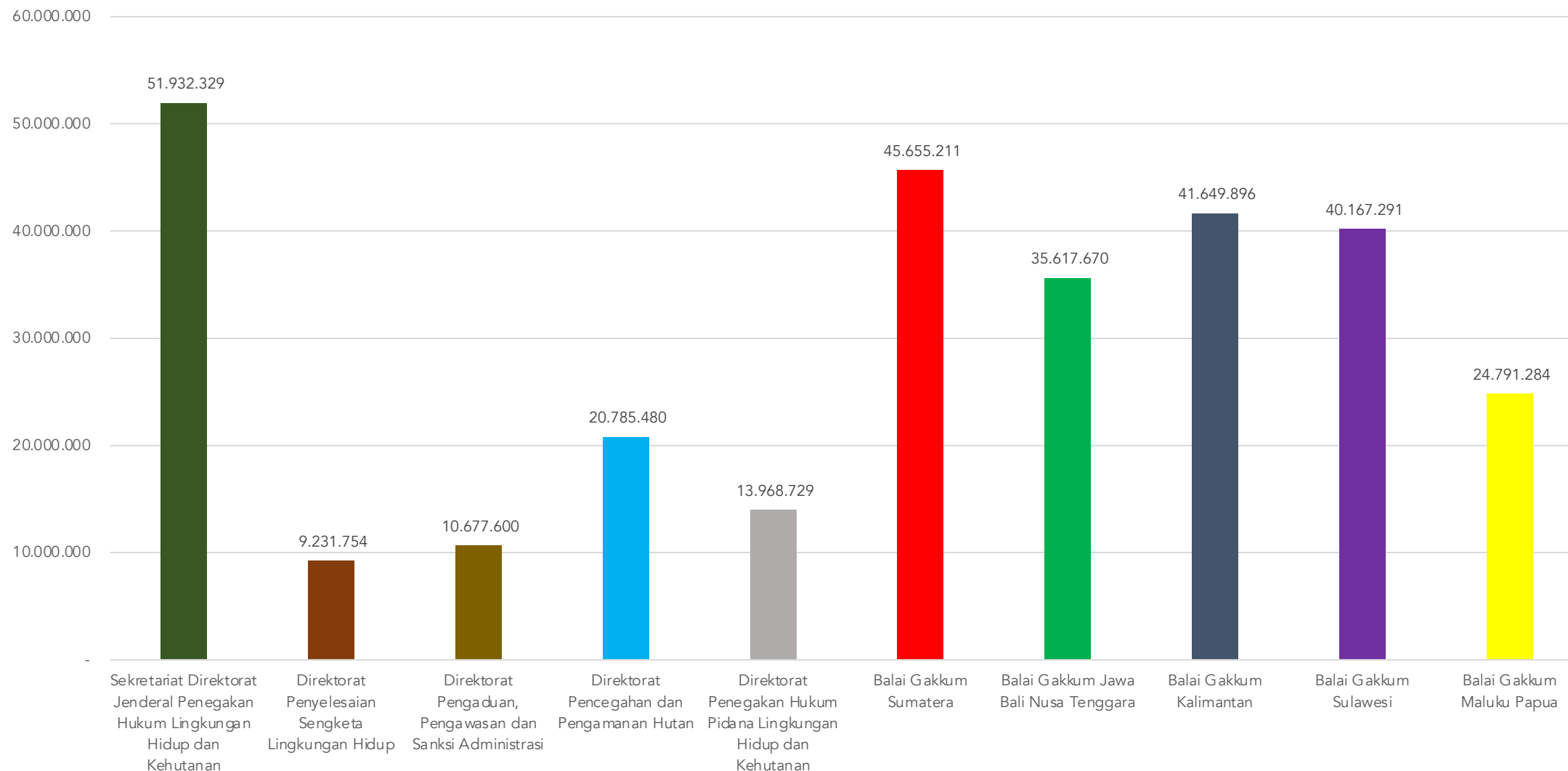
9) Pagu Alokasi Anggaran Refocusing IV Tahun 2021 Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK (dalam Ribuan Rupiah)





BAB III – RENCANA KERJA TAHUN 2021

10) Pagu Alokasi Anggaran Refocusing IV Tahun 2021, Per Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



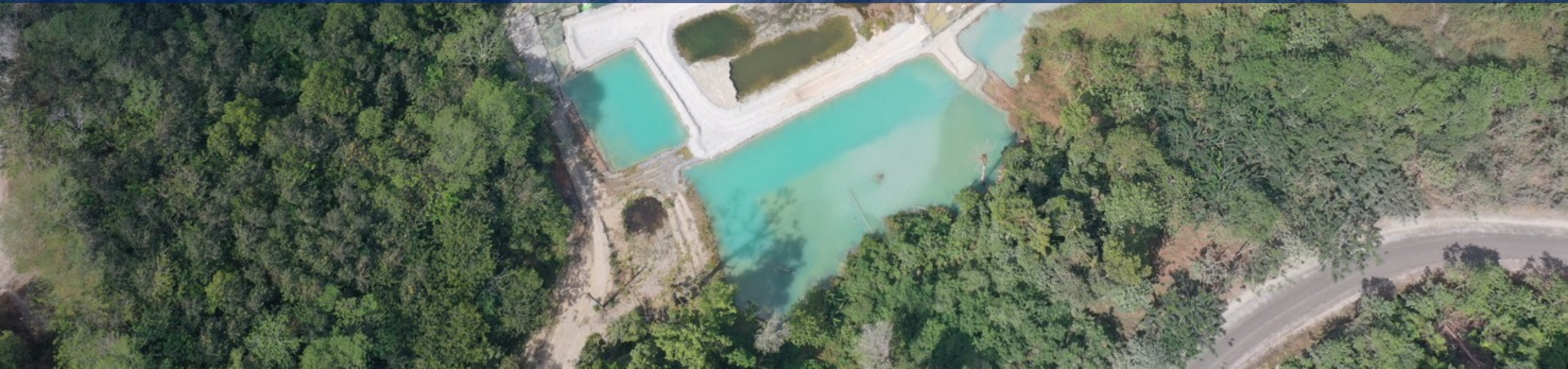
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama seiring Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan memperhatikan protokol Kesehatan. Rencana Kerja Tahun 2021 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2020, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2021. Rencana Kerja Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK Tahun 2021 telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK Tahun 2020-2024.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2021 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal GAKKUM LHK. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal KLHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian LHK di tahun 2021.





LAMPIRAN - LAMPIRAN





LAMPIRAN 1 – INDIKATOR KINERJA UTAMA GAKKUM KLHK TA 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target RPJMN	Anggaran RPJMN ('000)	Target RKP 2021	Anggaran RKP ('000)	Target Refocusing IV	Anggaran Refocusing ('000)
4 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik serta kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdaya saing	14 -Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum	2.267 Kasus 756.190.241 1.058 Kasus 344.665.771 762 Kasus 294.427.244								
		Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)	Teramankannya Hutan dari Gangguan dan Ancaman	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.900.000 Hektar	264.705.000	900.000 Hektar	70.905.000	600.000 Hektar	50.203.936
		Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD)	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan PUU	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkat	60%	112.130.000	40%	36.830.000	40%	22.963.839
	Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	387 Kasus	201.135.470	198 Kasus	70.911.000	152 Kasus	47.970.163	
	18- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	79 Poin 79 Poin 79 Poin								
	Dukungan Manajemen (029.WA)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK	74 Poin	178.219.771	74 Poin	166.019.771	74 Poin	173.289.306	



LAMPIRAN 2 – INDIKATOR KINERJA PROGRAM GAKKUM KLHK TA 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Rincian Output (KRO)	Target 2021	Anggaran 2021 ('000)	Target Refocusing IV	Anggaran Refocusing IV ('000)		
1. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)	Teramankannya Hutan dari Gangguan dan Ancaman	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (IKP.1)	900.000 Hektar				70.905.000	900.000 Hektar	50.203.936
			Operasi Pengamanan Kawasan Hutan (QHB)	90 Operasi	24.335.000	63 Operasi	19.486.497		
			Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (QHB)	73 Operasi	44.070.000	42 Operasi	28.362.602		
2. Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD)	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan PUU	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkatkan (IKP.2)	360 Orang				2.500.000	342 Orang	2.354.837
			Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan (DCE)	360 Orang	2.500.000	342 Orang	2.354.837		
			40%				36.830.000	40%	22.963.839
	Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IKP.3)	700 Perusahaan				26.209.200	505 Perusahaan	18.764.238
			Pengawasan Ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha (QIC)	700 Perusahaan	26.209.200	505 Perusahaan	18.764.238		
			Peningkatan Kapasitas PPLH (DCE)	150 Orang	10.620.800	95 Orang	4.199.601		
			192 Kasus				70.911.000	152 Kasus	47.970.163
3. Dukungan Manajemen (029.WA)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK (IKP.4)	24 Perkara				13.461.000	22 perkara	8.658.384
			Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup (QCD)	24 Perkara	13.461.000	22 perkara	8.658.384		
			Kasus Tindak Pidana LHK P-21 Perseorangan (QCA)	150 Perkara	31.629.407	127 Perkara	25.179.220		
			Kasus Tindak Pidana LHK P-21 Badan Usaha (QCD)	20 Perkara	3.930.593	3 Perkara	3.583.228		
			Peningkatan Kapasitas PPNS (DCE)	200 Orang	21.890.000	200 Orang	10.549.331		
74 Poin				166.019.771	74 Poin	173.289.306			
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (EAC)	1 Layanan	12.419.465	1 Layanan	10.256.797					
	Layanan Sarana Internal (EAD)	1 Layanan	3.842.544	1 Layanan	2.968.000				
	Layanan Perkantoran (EAA)	1 Layanan	144.757.762	1 Layanan	155.201.127				
	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja (EAC)	5 Layanan	5.000.000	5 Layanan	4.863.382				



LAMPIRAN 3 – INDIKATOR KINERJA KEGIATAN GAKKUM KLHK TA 2021

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (KRO)	Target 2021	Anggaran 2021 ('000)	Target Refocusing IV	Anggaran Refocusing IV ('000)
1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan (QHB)	90 Operasi	24.335.000	63 Operasi	19.486.497
		2. Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (QHB)	73 Operasi	44.070.000	42 Operasi	28.362.602
		3. Peningkatan Kapasitas POLHUT	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan (DCE)	360 Orang	2.500.000	342 Orang	2.354.837
2. Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan PUU terkait bidang LHK	1. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Pengawasan Ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha (QIC)	700 Perusahaan	26.209.200	505 Perusahaan	18.764.238
		2. PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas PPLH (DCE)	150 Orang	10.620.800	95 Orang	4.199.601
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan	1. Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup (QCD)	28 Perkara	13.461.000	22 perkara	8.658.384
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	1. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	Kasus Tindak Pidana LHK P-21 Perseorangan (QCA)	150 Perkara	31.629.407	127 Perkara	25.179.220
			Kasus Tindak Pidana LHK P-21 Badan Usaha (QCD)	20 Perkara	3.930.593	3 Perkara	3.583.228
		2. Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas PPNS (DCE)	200 Orang	21.890.000	200 Orang	10.549.331
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		74 Poin		74 Poin	
		2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		3 Poin		3 Poin	
		3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbit dan Akuntabel		1 Laporan		1 Laporan	
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (EAC)	1 Layanan	12.419.465	1 Layanan	10.256.797	
		Layanan Sarana Internal (EAD)	1 Layanan	3.842.544	1 Layanan	2.968.000	
		Layanan Perkantoran (EAA)	1 Layanan	144.757.762	1 Layanan	155.201.127	
		Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja (EAC)	5 Layanan	5.000.000	5 Layanan	4.863.382	



LAMPIRAN 4 – PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TA 2021

Rincian Output	Komponen Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target 2021	Anggaran 2021 ('000)	Target Refocusing IV	Anggaran Refocusing IV ('000)
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		DKI Jakarta	1 Layanan	12.419.465	1 Layanan	10.256.797
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran			1.632.009		1.403.553
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			1.825.000		1.255.000
	Pengelolaan keuangan			1.003.700		721.690
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal			2.150.000		1.885.000
	Pengelolaan kepegawaian			1.487.456		1.071.546
	Pelayanan umum dan perlengkapan			3.321.300		3.069.093
	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi			1.000.000		850.910
Layanan Sarana Internal			1 Layanan	3.842.544	1 Layanan	2.968.000
Layanan Perkantoran			1 Layanan	144.757.762	1 Layanan	155.201.127
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja		Medan, Surabaya, Makkasar, Samarinda, Manokwari	5 Layanan	5.000.000	5 Layanan	4.863.382
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran			1.500.000		1.261.000
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			1.000.000		990.484
	Pengelolaan keuangan			1.500.000		1.706.202
	Pengelolaan Kepegawaian			1.000.000		905.696
Total				166.019.771		173.289.306



LAMPIRAN 5 – SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GAKKUM KLHK TA 2021

Rincian Output	Komponen Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target 2021	Anggaran 2021 ('000)	Target Refocusing IV	Anggaran Refocusing IV ('000)
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		DKI Jakarta	1 Layanan	12.419.465	1 Layanan	10.256.797
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran			1.632.009		1.403.553
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			1.825.000		1.255.000
	Pengelolaan keuangan			1.003.700		721.690
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal			2.150.000		1.885.000
	Pengelolaan kepegawaian			1.487.456		1.071.546
	Pelayanan umum dan perlengkapan			3.321.300		3.069.093
	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi			1.000.000		850.910
Layanan Sarana Internal			1 Layanan	3.842.544	1 Layanan	2.968.000
Layanan Perkantoran			1 Layanan	38.171.056	1 Layanan	38.707.532
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja		Medan, Surabaya, Makassar, Samarinda, Manokwari	5 Layanan	0	5 Layanan	0
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran					
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					
	Pengelolaan keuangan					
	Pengelolaan Kepegawaian					
Total				54.433.065		51.932.329



K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p
d a n K e h u t a n a n

2021

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta 12190